



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **UNTUNG BASUKI**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR**
3. NHK : **128661**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.440.925.000**

1. Bangunan Seluas 34.25 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/162 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.030.500.000
3. Tanah Seluas 1375 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 334.125.000
4. Bangunan Seluas 24 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 435.600.000
5. Bangunan Seluas 22 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 256 m2/200 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 435.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 241 m2/160 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 345.700.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 222.000.000**

1. LAINNYA, POLYGON, DAHON (3 BUAH SEPEDA) SEPEDA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, NISSAN X-TRAIL 2.5 AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000



3. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	132.884.360
D. SURAT BERHARGA	Rp.	125.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.095.655.552
F. HARTA LAINNYA	Rp.	219.989.280
Sub Total	Rp.	5.236.454.192
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.236.454.192

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.